
ANALISA AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEUANGAN MASJID DI PURWAKARTA

Wawan Oktriawan¹, Hana Uswatun Hasanah², Hilma Tia Fauzia³, Elya Sari⁴

^{1,2,3,4}STAI Dr.Khez.Muttaqien

wawanoktariawan@staimuttaqien.ac.id¹, hanauswahtun@gmail.com², htiafauzia@gmail.com³,
elyasari70@gmail.com⁴

Abstrak

Masjid senenatiasa akan menjadi sorotan masyarakat terutama dalam hal pengelolaan keuangan agar selalu ada ketebukaan mengenai sumber dana terutama dari sumbangan yang di peroleh dari masyarakat. Pengurus masjid memiliki peran yang mutlak dalam hal pengelolaan uang masjid maka peran pengurus ini tidak bisa di lepaskan dari proses akuntabilitas dan transparansi. maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan trasparansi pengelolaan keuangan masjid di Kab. Purwakarta. Motode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas para pengurus masjid di Purwakarta sudah bertanggungjawab atas setiap dana yang terkumpul melalui proses perencanaan, pengelolaan,pelaksanaan dan pengawasan baik oleh pengurus, jamaah ataupun masyarakat melalui proses perencanaan, pengelolaan,pelaksanaan dan pengawasan baik oleh pengurus, jamaah ataupun masyarakat. Begitupun dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi, pengurus masjid di Purwakarta para pengurus masjid memberikan informasi pemasukan dan pengeluaran danadengan jangka waktu tertentu dan juga setiap kegiatan yang menggunakan dana dari masyarakat senantias di nformasikan baik secara lisan ataupun tulisan. Para pengurus masjid berencana menyampaikan segala informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan pengelolaan keuangan masjid melalui media online seperti *website, instagram, whatsapp center* dan *youtube*.

Kata Kunci: Masjid, Akuntabilitas, Transparansi, Purwakarta.

Abstract

The mosque will always be in the public spotlight, especially in terms of financial management so that there is always transparency regarding the source of funds, especially from donations obtained from the public. The mosque management has an absolute role in terms of managing mosque funds, so the role of this administrator cannot be separated from the process of accountability and transparency. So this study aims to determine the accountability and transparency of mosque financial management in Kab. Purwakarta. The method used in this study is qualitative with data collection techniques through interviews. The results of this study indicate that the implementation of the principle of accountability of mosque administrators in Purwakarta has been responsible for any funds collected through the process of planning,

managing, implementing and supervising both by the management, congregation or the community through the process of planning, managing, implementing and supervising both by the management, congregation or community. Likewise, in order to realize the principle of transparency, mosque administrators in Purwakarta, mosque administrators provide information on income and expenditure of funds for a certain period of time and also every activity that uses funds from the community is always informed either orally or in writing. Mosque administrators plan to convey all information related to mosque financial activities and management through online media such as websites, Instagram, WhatsApp Center and YouTube.

Keywords: Mosque, Accountability, Transparency, Purwakarta.

PENDAHULUAN

Sejak zaman rasulullah Muhammad saw. Masjid di dirikan memiliki fungsi agama dan fungsi soalian maka masjid di pergunakan untuk berbagai macam kegiatan bukan hanya untuk ibadah akan tetapi masjid juga di gunakan sebagai tempat kegiaian masyarakat lainnya, misalnya untuk bermusyawarah, kegiatan belajar mengajar, kegiatan kegiatan social dalam rangka saling mel= nolong sesame muslim. Untuk umat muslim, masjid merupakan suatu symbol dari peradaban masyarakat. Peradaban suatu masyarakat di sekitar masjid akan menentukan kemakmuran masjid itu sendiri.¹

Sejalan dengan meningkatnya penduduk muslim di Indonesia, maka pembangunan masjid pun semakin bertambah banyak, hal ini memberikan peluang untuk mengoptimalkan fungsi masjid akan semakin besar pula, terutama dalam hal pengelolaan keuangan masjid itu sendiri. Allah dengan jelas memerintahkan untuk memakmurkan masjid yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunah karna dengan memakmurkan masjid akan berdampak positif terhadap

masyarakat luas, dalam rangka memakmurkan masjid salah satunya di perlukan manajemen keuangan masjid dalam rangka tercapainya tujuan dan kemaslahatan umat.

Manajemen pengelolaan keuangan yang baik di perlukan dalam rangma menjaga kemakmuran dan kelangsungan hidup masjid karena masjid sendiri harus mencukupi semua kebutuhan operasionanya yang relative tidak sedikit. Masjid merupakan organisai non profit atau organisasi nirlaba yaitu suatu organisasi dengan tujuan tertentu dan akan berusaha guna mencapai tujuannya serta tidak berorientasi kepada laba semata hal ini di karenakan sumber dana masjid itu sendiri berasal dari pemerintah, infak, shodaqoh dan sumbangan masyrakat lainnya. Maka dana dana tersebut maka sudah seharusnya pengeloalan dana tersebut harus transparan.²

Dana masjid pertama di peruntukan untuk kebutuhan masjid yang bersifat konsumtif seperti pembelian perlengkapan dan renovasi masjid. Selain itu dana masjid juga bisa di dimanfaatkan untuk hal hal yang bersifat produkstif seperti di pinjmkkan

¹ Riyan Pradesyah, Deery Anzar Susanti, and Aulia Rahman, 'Analisis Manajemen Keuangan Masjid', *Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 4.2 (2021), 154–68.

² Ruci Arizanda Rahayu, 'Tranparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Masjid Agung Al-Akbar Surabaya', *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 4.2 (2017), 631–38 <<https://doi.org/10.22219/jrak.v4i2.4948>>.

kepada masyarakat guna membuka suatu usaha di sekitar halaman masjid, maka dari sinilah aka nada perutran uang masjid dalam rangka pemberdayaan masyarakat sehingga aka nada kemashlahatan untuk masyarakat itu sendiri

Masjid juga senenatiasa akan menjadi sorotan masyarakat terutama dalam hal pengelolaan keuangan agar selalu ada ketebukaan mengenai sumber dana terutama dari sumbangan yang di peroleh dari masyarakat. Maka sudah seharusnya masjid melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan membuat laporan keuangan secara peridik, akuntabel dan transparan, sehingga bisa meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat yang kemudian akan membuka peluang untuk menambah sumber dana yang berasal dari sumbangan

Dalam suatu organisasai public baik swasta maupun Lembaga keagamaan akuntabilitas ataupun transparansi ini sangatlah penting dan di perlukan, karena Lembaga public ini akan di tuntutan akuntabel dan transparansinya agar semua aktivitasnya terlihat baik.³ Pengurus masjid memiliki peran yang mutlak dalam hal pengelolaan uang masjid maka peran pengurus ini tidak bisa di lepaskan dari proses transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan apa yang sudah di sampaikan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan trasparansi pengelolaan keuangan masjid di Kab. Purwakarta

LANDASAN TEORI

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas secara filosofis islam dinamakan amanah adalah suatu cara supaya pihak pihak yang mendapatkan kewenangan atau Amanah dapat bertanggung jawab dengan napa yang telah di kerjakannya dan menyajikannya agar bisa menjadi perhatian public dan dilakasakan secara berkala.⁴ Syahrudin Rasul menyebutkan bahwa yang di maksud dengan akuntabilitas ialah suatu kemampuan dalam memberikan jawaban atau respon kepada pihak yang lebih tinggi atas aktivitas seseorang atau sekelompok orang kepada masyarakat luas di dalam organisasi.⁵

Akuntabilitas juga dapat di artikan sebagai suatu wujud pertanggungjawaban dari seseorang yang di mendapatkan Amanah kepada pihak pihak yang memerlukan pertanggungjawaban atas segala akitivitas yang sudah dilaksanakan oleh pemegang Amanah tersebut.⁶

Berdasarkan berapa definisi tersebut maka dapat simpulkan bahwa akuntabilitas adalah suatu jawaban dari pemegang Amanah kepada pemberi Amanah sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dlakukan secara berkala dan akan menjadi perhatian public.

Salah satu prinsip dalam akuntansi syariah adalah pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Akuntabilitas ini berhubungan erat dengan suatu amanah yang mana bagi seorang muslim amanah merupakan

³ Hajar Karimah and Ahmad Baehaqi, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Manajemen Keuangan Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi', *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 7.1 (2022), 1–13 <<https://doi.org/10.32528/jiai.v7i1.6898>>.

⁴ AlMuddaststsir and Sawarjuwono, 'The Way to Build a Mosque Accountability', *Journal of Contemporary Accounting and Economics*

Symposium 2018 on Special Session for Indonesian Study, 2018.

⁵ H. A. Rusdiana and Nasihudin, *Akuntabilitas Kinerja Dan Laporan Penelitian* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD, 2018).

⁶ Mikael Edowai, Arwini Puspita, and Hasriani, *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah* (Gowa - Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021).

hubungan dirinya dengan Allah sang maha pencipta.⁷

Pengukuran akuntabilitas dalam lembaga atau organisasi non profit dapat dilihat dengan 5 (lima) unsur, diantaranya:⁸

- a. Pernyataan dan pengungkapan laporan keuangan
- b. Penilaian dan evaluasi kinerja
- c. Proses partisipasi dalam organisasi
- d. Memiliki regulasi sendiri
- e. Audit sosial

2. Transparansi

Transparansi merupakan penyediaan informasi terkait laporan keuangan dengan jujur dan terbuka kepada masyarakat dengan berbagai pertimbangan misalnya masyarakat mempunyai hak melihat secara terbuka dan menyeluruh terhadap pengelolaan sumber daya yang di lakukan pemerintah sebagai bentuk kepercayaan dan ketaatan terhadap undang undang.⁹ Transparansi merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap masyarakat.¹⁰

Dalam kegiatan yang bersifat public transparansi keberadaan transparansi ini sangat penting dalam rangka pengawasan terhadap pengelolaan keuangan. Masyarakat bisa melakukan pengawasan sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan keuangan. Transparansi juga

dapat meningkatkan kinerja pegawai sehingga bisa bekerja lebih baik lagi dalam menentukan kebijakan dan melaksanakan kegiatan kegiatan lainnya.¹¹

Jadi transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang harus di jalan oleh semua pengurus atau pengelola di dalam menyampaikan suatu informasi. Dengan kata lain bahwa setiap informasi yang diampaikan oleh pengelola kepada stakeholder harus lengkap, benar dan tepat waktu.

Unsur unsur transparansi yang harus terpuhi diantaranya adalah Penyampaian informasi yang jelas, Mudahnya akses informasi dan memaksimalkan media informasi yang dimiliki serat menyusun mekanisme untuk pengaduan.¹²

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang sudah di kemukakan di atas maka desain dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dan data skunder yang di peroleh melalui tinjauan kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data menggunakan analisa data model

⁷ M. Khaddafi and others, *Akuntansi Syariah* (Medan: Madenatera, 2017).

⁸ Alnoor Ebrahim, 'Accountability In Practice: Mechanisms for NGOs', *World Development*, 31.5 (2023), 813–29 <[https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00014-7](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00014-7)>.

⁹ Christina Yunnita Garung and Linda Lomi Ga, 'Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka', *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8.1 (2020), 19–27 <<https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>>.

¹⁰ Fanny Jitmau, Lintje Kalangi, and Linda Lambey, 'Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong)', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing 'Goodwill'*, 8.1 (2017), 276–85 <<https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.16036>>.

¹¹ Bambang Jatmiko, 'Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman)', *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7.2 (2020), 231–46 <<https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446>>.

¹² Lina Lalolo Krina, 'Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi', 2003.

alir (*Flow Model*) Milles dan Huberman, melalui tahapan tahapan berikut ini ¹³:

1. Pengumpulan Data

Yang paling utama pada tahapan ini adalah melakukan pengamatan terhadap perilaku dan pembicaraan narasumber dalam wawancara. Dalam rangka memperoleh informasi yang di perlukan dalam penelitian maka di haruskan adanya catatan lapangan. Catatan lapangan ini dapat berupa catatan yang langsung di hasilkan dari wawancara, ataupun hasil Analisa kondisi di lapangan

2. Reduksi Data

Reduksi data meruapakan suatu tahapan memilih suatu tema tertentu yang di dapatkan dalam prosesn pengumpulan data. Dalam tahapan ini di lakukan dengan membuat ringkasan data, kodifikasi serta menelusuri tema yang berkaitan dengan penelitian. Dalam Analisa data milles dan Huberman ini biasanya pada tahapan ini data bisa berulang selama proses penelitian

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan aktivitas menghimpun suatu informasi yang berbentuk narasi menjadi bentuk matriks, gambar ataupun grafis, hal ini agar dalam mengambil keputusan selanjutnya apakan bisa langsung di ambil kesimpulan atau di perlukan pengambilan data kembali

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap selanjutkan sesudah data di sajikan adalah merik sebuah kesimpulan. Pada tahap ini peneliti menjau Kembali data yang di hasilkan di lapangan dan prosesn pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta perikan kesimpulan ini dapat di ulangi Kembali sampai memperoleh hasil yang di inginkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dalam kurun waktu february 2023 sampai dengan Mei 2023 melalui wawancara kepada pengurus masjid yang ada di kabupaten Purwakarta yang sudah terdaftar dalam data simas kemenag Purwakarta. Peneliti mengambil 30 Masjid yang sudah melakukan membuat pembukuan laporan keuangan sederhana. Berikut merupakan daftar masjid dalam penelitian ini:

Tabel 1.1
Daftar Masjid

No	Nama Masjid	No	Nama Masjid
1	Masjid Al-Jihad Wanayasa	14	Masjid Agung Baing Yusuf
2	Masjid At-taqwa	15	Masjid Jami Al-khaira
3	Masjid Nurul Huda	16	Masjid Al-Ukhwah
4	Masjid Al-Ihsan	17	Masjid Al-Hodayah Babakancikao
5	Masjid Baetud Mu'min	18	Masjid Al Barokah
6	Masjid Al-Hidayah Nagrikaler	19	Masjid Al Huda
7	Masjid Al-Aqobah	20	Masjid Al Jihad Nagrog
8	Masjid Baitul Hikmah	21	Masjid jami Al - Mishbah
9	Masjid An-Nur	22	Mesjid Jami Al-Hikmah
10	Masjid Al-Muthohhar	23	Masjid Nurul Qomar
11	Masjid Jami Al-Maghfiroh	24	Mesjid jami Asy-syifa
12	Masjid Hayatul Hasanah	25	Masjid Baiturrahman
13	Masjid Umar Ibnu Khothob	26	Masjid Al-Itihaad

1. Penerapan prinsip Akuntabilitas

a. Pernyataan serta pengungkapan laporan keuangan

Pengurus DKM di Purwakarta dalam menyusun anggaran kegiatan di lakukan satu pekan sekali pada hari yang berbeda beda. Dalam menyusun anggaran di lakukan dengan tahapan setiap bagian akan mengajukan kebutuhan anggaran untuk satu pekan ke depan kepada pemegang kas (bendahara) dan ada sebagian masjid yang langsung mengajukan kepada ketua DKM, kemudian akan di sahkan oleh Ketua DKM dan setiap bagian akan mencairkan anggaran tersebut di bagian pemegang kas. Anggaran yang telah di ajukan biasaya akan terealisasi 100% terpakai sesuai kebutuhan yang sudah di rencanakan. Sumber dana masjid berasal dari infak dan shodaqoh jamaah/masyarakat yang tetap atau pun tidak tetap. Sumber penerimaan yang tetap seperti melalui kotak

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

amal yang di miliki masjid di antaranya kotak amal harian, kotak amal pengajian atau kotak amal idul fitri dan idul adha, sementara itu sumber penerimaan tidak tetap yaitu yang sifatnya tidak rutin seperti amal jariyah perorangan yang langsung diberikan kepada pengurus masjid.

Sumber dana yang berasal dari kotak infak masjid ada yang di hitung setiap hari selepas sholat isya ada juga yang di hitung satu pekan sekali setiap hari kamis, dalam proses perhitungan ini di saksikan oleh pengurus setidaknya oleh bendahara atau ketua DKM. Di karenakan kebutuhan operasional masjid sehari hari tidak sedikit seperti untuk tagihan dan perbaikan maka dana yang terkumpul dari kotak amal akan di simpan dalam brankas khusus agar mempermudah proses pembayaran. Sebagian masjid yang sudah memiliki rekening atas nama masjid itu sendiri akan menyetorkan uang ke rekening di bank setiap satu bulan sekali, dan apabila ada kekurangan/*deficit* anggaran maka saldo yang di bank akan di Tarik kembali untuk di jadikan kas kecil/*petty cash* masjid. Untuk masjid yang tidak memiliki rekening di bank atas nama masjid maka uang akan tetap di simpan di bendahara masjid.

Sistem pelaporan keuangan masjid di Purwakarta dilakukan rutin satu pekan sekali setiap hari jumat. Pelaporan keuangan kepada masyarakat selain di sampaikan melalui lisan juga di sampaikan dengan media lain seperti laporan tertulis yang di tempel di papan pengumuman yang di miliki masjid. Dengan system pelaporan tersebut di harapkan masyarakat bias ikut menilai kinerja para pengurus masjid di kabupaten Purwakarta

b. Penilaian dan Evaluasi Kinerja

Dalam rangka menilai kinerja para pengurus masjid, maka setiap satu bulan sekali masjid masjid di Purwakarta mengadakan rapat evaluasi, pengurus DKM

akan menyampaikan hasil rapat evaluasi tersebut kepada pihak pemerintah setempat, bagi masjid yang berstatus sebagai masjid agung maka akan menyampaikan hasil evaluasi ke bupati purwakarta, untuk masjid yang berstatus masjid besar akan menyampaikan pada camat, dan untuk masjid dengan status masjid Jamie akan melaporkan hasil evaluasi ke RW setempat

Penilaian dan evaluasi masjid masjid di Purwakarta , baru di dilaksanakan sampai pemerintahan setempat, akan tetapi untuk masjid agung ada rencana penilaian laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

c. Proses Partisipasi Dalam Organisasi

Setiap pengurus masjid di Purwakarta tidak semuanya semuanya terlibat langsung dalam mengelola keuangan, akan tetapi mereka tetap mempunyai hak dalam memberikan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan masjid yang sedang berjalan. Keikutsertaan semua pengurus di mulai melalui penerimaan shodaqoh atau infak dimana setiap pengurus bias berpartisipasi melalui kotak amal serta ikut serta dalam menghitung jumlah uang yang masuk.

Jamaah atau masyarakat merupakan bagian yang tidak bias di pisahkan dari masjid masjid yang ada di Purwakarta maka apabila pengurus masjid ada kekurangan dan harus ada yang perlu di perbaiki dalam pengelolaan terutama pengeloaan keuangan maka msyarakat atau jamaah memiliki kewajiban untuk mengingatkannya. Selain iti jamaah atau masyarakatsebagai donator ataupun stakeholder juga perlu mengetahui pertanggungjawaban pengerus masjid terhadap dana yang sudah masuk dan rutin di berikan.

d. Memiliki Regulasi sendiri

Masjid masjid di Purwakarta dalam pengelolaan keunagan belum mempunyai

standar keuangan secara tertulis, praktik pencatatan dan pelaporan keuangan masih sesuai dengan kebiasaan yang sudah berjalan, khusus untuk masjid agung pencatatan dan pelaporan keuangan merujuk pada peraturan bupati Purwakarta serta Standar Pembinaan Manajemen Masjid dari Bina Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.

Standar penyusunan laporan keuangan selain dari 2 peraturan yang di sebutkan di atas sebenarnya masjid di Purwakarta bisa menggunakan PSAK 109 tentang Akuntansi zakat, Infak dan Shodaqoh dan bisa juga menggunakan ISAK 35 mengenai pembuatan laporan keuangan untuk lembaga yang berorientasi non laba.

e. Audit social

Jamaah atau masyarakat malakukan audit social, hal ini dilakukan dimana jamaah atau masyarakat ikut serta dalam mengawasi setiap kegiatan yang ada di masjid sebagai wujud perhatian atas kontribusi dana yang di berikan. Para pengurus masjid di purwakarta akan selalu terbuka menerima saran,kritik, masukan dari jamaah atau masyarakat apabila ada praktik pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

2. Penerapan Prinsip Transparansi

Tercapainya prinsip transparansi salah satu indikatornya adalah laporan keuangan dapat tersampaikan kepada masyarakat pada hari jumat khususnya ketika sholat jumat serta melalui media lainnya seperti papan pengumuman yang dimiliki masjid. Beberapa masjid di Purwakarta dalam menyampaikan laporan keuangan juga melalui media social seperti Whatsapp grup jamaah masjid, hal ini dilakukan dalam rangka agar seluruh jamaah atau masyarakat bisa melihat dan membaca laporan pengelolaan keuangan masjid baik yang hadir ke masjid ataupun yang tidak dapat hadir. Pelaporan

keuangan masjid sebagai bentuk transparansi pengurus masjid bahwa telah membelanjakan dana yang sudah terima baik dari infak ataupun shodaqoh masyarakat guna kegiatan yang bermanfaat sehingga di harapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengurus masjid yang ada di Purwakarta.

Malalui perkembangan teknologi, beberapa pengurus masjid juga berencana menggunakan media social guna menyampaikan dan mensosialisasikan kegiatan masjid kepada masyarakat luas. Media social yang rencananya akan di gunakan adalah website, instagram, youtube ataupun whatsapp center, agar masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi mengenai kegiatan masjid di purwakarta

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa pertama para pengurus masjid di Purwakarta telah melakukan pertanggungjawaban atas setiap dana yang terkumpul melalui proses perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan baik oleh pengurus, jamaah ataupun masyarakat. Dalam merencanakan anggaran pengurus masjid menyesuaikan dengan kebutuhan di setiap bagian kepengurusan masjid. Pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh setiap unsur baik dari internal maupun eksternal sesuai dengan pedoman anggaran yang sudah di buat. Pengawasan di lakukan oleh masyarakat yang secara rutin bisa menyampaikan evaluasi dan memberikan kritik dan saran secara terbuka.

Kedua, dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi pengurus masjid di Purwakarta para pengurus masjid memberikan informasi pemasukan dan pengeluaran dan dengan jangka waktu tertentu dan juga setiap kegiatan yang menggunakan dana dari masyarakat

senantiasa diinformasikan baik secara lisan ataupun tulisan.

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pihak masjid. Para pengurus masjid berencana menyampaikan segala informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan pengelolaan keuangan masjid melalui media online seperti *website, instagram, whatsapp center* dan *youtube*

DAFTAR PUSTAKA

- AlMuddaststsir, and Sawarjuwono, 'The Way to Build a Mosque Accountability', *Journal of Contemporary Accounting and Economics Symposium 2018 on Special Session for Indonesian Study*, 2018
- Ebrahim, Alnoor, 'Accountability In Practice: Mechanisms for NGOs', *World Development*, 31.5 (2023), 813–29 <[https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00014-7](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00014-7)>
- Edowai, Mikael, Arwini Puspita, and Hasriani, *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah* (Gowa - Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021)
- Garung, Christina Yunnita, and Linda Lomi Ga, 'Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka', *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8.1 (2020), 19–27 <<https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>>
- Jatmiko, Bambang, 'Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman)', *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7.2 (2020), 231–46 <<https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446>>
- Jitmau, Fanny, Lintje Kalangi, and Linda Lambey, 'Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong)', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing 'Goodwill'*, 8.1 (2017), 276–85 <<https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.16036>>
- Karimah, Hajar, and Ahmad Baehaqi, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Manajemen Keuangan Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi', *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 7.1 (2022), 1–13 <<https://doi.org/10.32528/jiai.v7i1.6898>>
- Khaddafi, M., S. Siregar, M.Y. Noch, Nurlaela, H. Harmain, and Sumartono, *Akuntansi Syariah* (Medan: Madenatera, 2017)
- Krina, Lina Lalolo, 'Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi', 2003
- Pradesyah, Riyan, Deery Anzar Susanti, and Aulia Rahman, 'Analisis Manajemen Keuangan Masjid', *Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 4.2 (2021), 154–68
- Rahayu, Ruci Arizanda, 'Tranparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Masjid Agung Al-Akbar Surabaya', *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 4.2 (2017), 631–38 <<https://doi.org/10.22219/jrak.v4i2.4948>>
- Rusdiana, H. A., and Nasihudin, *Akuntabilitas Kinerja Dan Laporan Penelitian* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD, 2018)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017)